# LAPORAN KINERJA

# KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN

# **TAHUN 2021**



**KABUPATEN MADIUN** 

**TAHUN 2021** 

#### KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan Dolopo merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2021. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-3 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Dolopo Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Dolopo Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan Dolopo. Kinerja KecamatanDolopo diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Dolopo Tahun 2021.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Dolopo Tahun 2021 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Dolopo pada tahuntahun selanjutnya,

sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerahsecara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

CAMAT DOLOPO

HERY FAJAR NUGROHO, S.Sos, M.Si

MAD Pembina

NIP. 19720524 199703 1 004

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	5
D. Landasan Hukum	6
E. Sistematika	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis	8
B. Rencana Kinerja Tahun 2021	15
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. Capaian Kinerja Organisasi	35
B. Realisasi Anggaran	46
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	47
BAB IV PENUTUP	52
LAMPIRAN	
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	
MATRIKS RENSTRA	
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	
PERIANIIAN KINERIA KEPALA PERANGKAT DAERAH	

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Dolopo selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitima

sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2021 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

## B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
- b. Mengkoordinasikan upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundangundangan
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- f. Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
- g. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa/kelurahan
- h. Melaksanakan tugas pembantuan terhadap pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan

- pembangunan serta peralihan status sesuai peraturan perundangundangan
- i. Penyelenggaraan fasilitasi penetapan peruntukan, proses pengendalian dan perubahan status tanah kekayaan Desa/Kelurahan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerahmempunyai fungsi :

- Perencanaan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat;
- Pelaksanaan Koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang terpadu;
- Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- o Pelaksanaan Pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat;
- o Pelaksanaan pembinaan Penyelenggaraan pemabngunan masyarakat

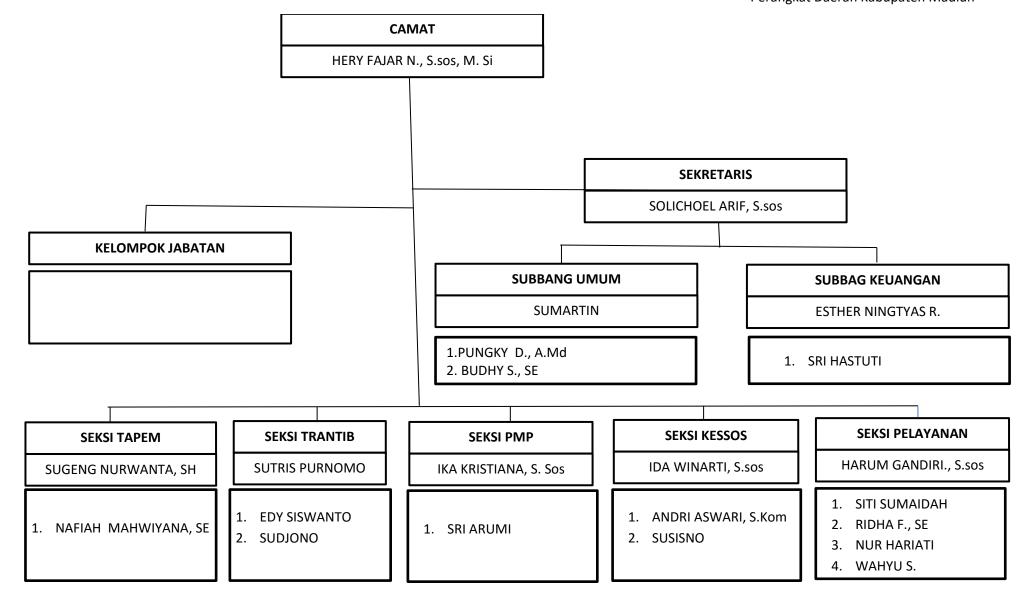
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Camat Dolopo sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Seksi, Sub Bag. Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

#### Gambar 1.1

#### STRUKTUR ORGANISASI

### KANTOR CAMAT DOLOPO

Dasar : Peraturan Daeah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun



Sumber: Renstra Kecamatan Dolopo periode 2018-2023

## C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Dolopo periode 2018-2023 sebagai berikut:

- 1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Madiun kepada Camat untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di Wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada azas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Madiun;
- 2. Peningkatan kualitas dan disiplin aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pemberian pelayanan kepada masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur;

3. Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat. Kecamatan harus tetap mengacu partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada program-program pemberdayaan masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu upaya kecamatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Perumusan Isu strategis pada tahun 2021 mengacu pada Renstra Kecamatan Dolopo periode 2018-2023, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2022 sebagai berikut:

- 1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal;
- 2. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di desa.

#### D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Dolopo ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023;

- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- 5. Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
- 6. Peraturan Bupati Madiun Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

### E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2021 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis

yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis

Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

#### **BAB II**

## PERENCANAAN KINERJA

## A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Rencana Strategis Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023 . Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dan stakeholder.

Selanjutnya, RenstraKecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

#### 1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Madiun.

Visi Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 adalah:

## Visi Kabupaten Madiun

Terwujudnya Kabupaten Madiun aman, sejahtera, dan berahlak.

#### 2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- Mewujudkan rasa aman bagi seluruh Masyarakat dan aparatur pemerintah Kabupaten Madiun
- 2. Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik
- 3. Meningkatkan Pemabngunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agro industri dan parawisata yang berkelanjutan;
- 4. Meningkatkan Kesejahteraan yang berkeadilan
- Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Dolopo mengacu pada Misi ke-02, yaitu :

Selanjutnya, RenstraKecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

#### 3. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Madiun.

Visi Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 adalah:

## Visi Kabupaten Madiun

Terwujudnya Kabupaten Madiun aman, mandiri, sejahtera, dan berahlak

#### 4. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- 6. Mewujudkan rasa aman bagi seluruh Masyarakat dan aparatur pemerintah Kabupaten Madiun
- 7. Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik
- 8. Meningkatkan Pemabngunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agro industri dan parawisata yang berkelanjutan;
- 9. Meningkatkan Kesejahteraan yang berkeadilan
- 10. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Dolopo mengacu pada Misi ke-02, yaitu:

# Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan Pelayanan Publik

## 5. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 sebanyak 1 tujuan dan 1 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TAR		KINEI AHU	RJA PA N	ADA
			KINERJA	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatn	Meningkatkan	Indeks	76	77	78	79	80
	ya Penyelengg	Kinerja	Kepuasan					
	araan Tata	Pelayanan	Masyarakat					
	Kelola Pemerintah	Masyarakat	Kecamatan					
	an yang efektif dan							
	akuntabel							
	Dalam							
	Pelayanan							
	Masyarakat							
	yang berkualitas							
	DerKuantas		Nilai sakip	81	82	83	84	85
			Kecamatan		-			

Sumber: Renstra Kecamatan Dolopo periode 2018-2023

## 6. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR					PENJ	ELASAN			
NO	STRATEGIS		KINERJA	SATUAN	ALASAN	F		ASI/RUN TUNGA		SUMBE DATA	
1.	Meningkatnya	1.1.	Indeks	nilai		Total	dari	Nilai	persepsi	Kasi Pelayaı	nan
	Penyelenggaran Tata		Kepuasan			perunsi	ır/total	unsur ya	ng terisi x		
	Kelola Pemerintahan		masyarakat			nilai pe	nimbanş	3			
	yang efektif dan		Kecamatan								
	akuntabel Dalam	2.1	Nilai sakip	nilai		Hasil E	valuasi S	Sakip OPI	)	Kasubag	
	Pelayanan Kecamatan		Kecamatan							Keuangan	
	yang berkualitas									Program	dan
										Pelaporan	

Sumber : Indikator Kinerja Utama KecamatanDolopo Tahun 2021

## B. Rencana Kinerja Tahun 2021

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2021 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Dolopo Tahun 2021 :

Tabel 2.3

Rencana Kinerja Tahun 2021

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatn ya Penyelengg araan Tata kelola Pemerintah an Yang Efektif dan akuntabel Dalam Pelayanan Kecamatan yang berkualitas	Meningkatkan kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Pelayanan Masyarakat Kecamatan		78
			Nilai Sakip Kecamatan	Nilai	83

Sumber: Rencana Kerja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tahun 2021

## C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021. Pada tanggal 02 bulan 11 tahun 2021 ditetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2021

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2			3	5
1	Meningkatnya	Kinerja		IKM Nilai B	78
	Pelayanan Publik				
2	Meningkatnya			Nilai Sakip Kecamatan	83
	Akuntabilitas	Kinerja		A	
	Kecamatan				

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Kabupaten / Kota		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.143.134.129	APBD II
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 5.324.565	APBD II
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 4.802.800	APBD II
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 43.025.964	APBD II
	Penyediaan bahan Cetakan dan penggandaan	Rp. 13.600.800	APBD II
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Rp. 1.980.000	APBD II
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 74.400.000	APBD II
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Pengadaan Peralatan dan	-	-

Mesin Lainnya		
Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemeritah Daerah	Rp. 98.648.400	APBD II
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Rp.28.448.400	APBD II
Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor	Rp. 70.200.000	APBD II
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 93.125.810	APBD II
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 68.590.780	APBD II
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp.7.982.250	APBD II
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Rp.16.552.780	APBD II
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 3.616.000	APBD II
Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 3.616.000	APBD II
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.18.755.050	APBD II
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp.18.755.050	APBD II
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	Rp. 9.975.000	APBD II

	Umum		
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp. 9.975.000	APBD II
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 17.653.950	APBD II
	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional	Rp. 17.653.950	APBD II
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 54.000.000	APBD II
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Rp. 54.000.000	APBD II

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Dolopo Tahun 2021

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapakan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Dolopo :

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan Kecamatan Dolopo Tahun 2021

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang			
	Kabupaten / Kota			
	Administrasi Umum	Kebutuhan	12 Bulan	Rp.143.134.129
	Perangkat Daerah	Administrasi		
		Umum Perangkat		
		Daerah yang		
		Terlaksana		
	Penyediaan Komponen	Tersedianya	12 Bulan	Rp. 5.324.565
	Instalasi	kebutuhan		
	Listrik/Penerangan	komponen Instalasi		
	Bangunan Kantor	listrik		
	Penyediaan Peralatan	Tersedianya	12 Bulan	Rp. 4.802.800
	Rumah Tangga	Peralatan Rumah		
		Tangga		
	Penyediaan Bahan	Tersedianya Bahan	12 Bulan	Rp. 43.025.964
	Logistik Kantor	Logistik Kantor		
	Penyediaan bahan	Tersedianya Barang	12 Bulan	Rp. 13.600.800
	Cetakan dan	Cetakan dan		
	penggandaan	Penggandaan		
	Penyediaan Bahan	Tersedianya Bahan	12 Bulan	Rp. 1.980.000
	Bacaan dan Peraturan	Bacaan dan		
	Perundang-undangan	Peraturan		
		Perundang-		
		Undangan		

Tersedianya	12 Bulan	Rp. 74.400.000
Penyelenggaraan		
Rapat Koordinasi		
dan Konsultasi		
SKPD		
Kebutuhan	12 Bulan	-
Pengadaan Barang		
Milik Daerah		
Penunjang urusan		
Pemerintah Daerah		
yang tersedia		
Tersedianya	12 Bulan	-
kebutuhan		
Peralatan dan Mesin		
Kantor		
Tersedianya Jasa	12 Bulan	Rp. 98.648.400
Penunjang Urusan		
Pemerintahan		
Daerah		
Tersedianya Jasa	12 Bulan	Rp.28.448.400
Komunikasi dan		
Sumber Daya Air		
Tersedianya Jasa	12 Bulan	Rp. 70.200.000
Pelayanan Umum		
Kantor		
Tersedianya Jasa	12 Bulan	Rp. 93.125.810
Pemeliharaan dan		
T CITICITIATAATI GATI		
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia  Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  Tersedianya Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air  Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor  Tersedianya Jasa	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia  Tersedianya kebutuhan Peralatan dan Mesin Kantor  Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  Tersedianya Jasa Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  Tersedianya Jasa I2 Bulan Komunikasi dan Sumber Daya Air  Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor  Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor

Daerah	Peorangan atau		
	Kendaraam Dinas		
	Jabatan		
Penyediaan Jas	Tersedianya Jasa	12 Bulan	Rp. 68.590.780
Pemeliharaan, Biay	Pemeliharaan, Biaya		
Pemeliharaan, dan Pajal	Pemeliharaan, dan		
Kendaraan Perorangan	Pajak Kendaraan		
Dinas atau Kendaraa	Perorangan Dinas		
Dinas Jabatan	atau Kendaraan		
	Dinas Jabatan		
Pemeliharaan Peralatan	Terlaksananya	12 Bulan	Rp.7.982.250
dan Mesin lainnya	Pemeliharaan		
	Peralatan dan Mesin		
	lainnya		
Pemeliharaan/Rehabilit	Terlaksananya	12 Bulan	Rp.16.552.780
asi Gedung Kantor dan	Pemeliharaan/Reha		
Bangunan lainnya	bilitasi Gedung		
	Kantor dan		
	Bangunan lainnya		
2. Program	Terselenggaranya	12 Bulan	Rp. 3.616.000
Penyelenggaraan	Program		
Pemerintahan dar	Penyelenggaraan		
Pelayanan Publik	Pemerintahan dan		
	Pelayanan Publik		
Peningkatan efektifita	s Terlaksananya	12 Bulan	Rp. 3.616.000
Pelaksanaan Pelayana	Rapat Koordinasi		
kepada Masyarakat d	i Seksi Pelayanan		
Wilayah Kecamatan			

3.	Program Pemberdayaan	Terselenggaranya	12 Bulan	Rp.18.755.050
	Masyarakat Desa dan	Program		
	Kelurahan	Pemberdayaan		
		Masyarakat Desa		
		dan Kelurahan		
	Peningkatan Efektifitas	Terlaksananya	12 Bulan	Rp.18.755.050
	Kegiatan Pemberdayaan	Musrenbang, Rapat		
	Masyarakat di Wilayah	Koordinasi, Seksi		
	Kecamatan	Pemberdayaan		
		Masyarakat Desa		
		dan Pembangunan		
4.	Program Koordinasi	Terselenggaranya	12 Bulan	Rp. 9.975.000
	Ketentraman dan	Program Koordinasi		
	Ketertiban Umum	Ketentraman dan		
		Ketertiban Umum		
	Harmonisasi Hubungan	Terlaksananya	12 Bulan	Rp. 9.975.000
	dengan Tokoh Agama	Rapat Koordinasi		
	dan Tokoh Masyarakat	Seksi Kesos		
5.	Program	Terselenggaranya	12 Bulan	Rp. 17.653.950
	Penyelenggaraan	Program		
	Urusan Pemerintahan	Penyelenggaraan		
	Umum	Urusan		
		Pemerintahan		
		Umum		
	Fasilitasi, Koordinasi,	Terlaksananya	12 Bulan	Rp. 17.653.950
	dan Pembinaan (Bimtek,	Rapat Koordinasi		
	Sosialisasi, Konsultasi)	Seksi Trantib dan		
	Wawasan Kebangsaan,	Peringatan Hari		

	dan Ketahanan Nasional	Besar Nasional		
6.	Program Pembinaar	Terselenggaranya	12 Bulan	Rp. 54.000.000
	dan Pengawasar	Program Pembinaan		
	Pemerintahan Desa	dan Pengawasan		
		Pemerintahan Desa		
	Fasilitasi Pelaksanaar	Terlaksananya	12 Bulan	Rp. 54.000.000
	Pemilihan Kepala Desa	Pemilihan Kepala		
		Desa		

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- 1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- 2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- 3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 02 bulan Nopember tahun 2021 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program,kegiatan dan alokasi anggaran(dipilih point 1 s.d. 3) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

24

Tabel 2.6
Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2021

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2		3		5
1	Meningkatkan Kinerja		Indeks I	Kepuasan	78
	Pelayanan Kecamatan	Masyarakat ecamatan			
			Nilai Sakip Kecamatan		83

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Kabupaten /Kota		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 93.828.374	APBD II
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 5. 324.565	APBD II
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 6.802.800	APBD II
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 31.393.709	APBD II
	Penyediaan bahan Cetakan dan penggandaan	Rp. 5.677.300	APBD II
	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Rp. 1.740.000	APBD II

Peraturan Perundang-undangan		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 42.890.000	APBD II
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.23.451.835	APBD II
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.23.451.835	APBD II
Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemeritah Daerah	Rp. 81.674.090	APBD II
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Rp. 16.768.720	APBD II
Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor	Rp. 64.905.370	APBD II
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 124.470.024	APBD II
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 68.590.780	APBD II
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp. 7.982.250	APBD II
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Rp. 47.896.994	APBD II

	lainnya		
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 28.086.000	APBD II
	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 28.086.000	APBD II
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 17.303.750	APBD II
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 10.583.750	APBD II
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rp. 6.720.000	APBD II
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 79.378.400	APBD II
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp. 75.125.000	APBD II
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh	Rp. 4.253.400	APBD II

	Masyarakat		
5.	Program Penyelenggaraan	Rp. 6.119.200	APBD II
	Urusan Pemerintahan Umum		
	Fasilitasi, Koordinasi, dan	Rp. 6.119.200	APBD II
	Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,		
	Konsultasi) Wawasan		
	Kebangsaan, dan Ketahanan		
	Nasional		
6.	Program Pembinaan dan	Rp. 37.702.046	APBD II
	Pengawasan Pemerintahan Desa	1	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan	Rp. 37.702.046	APBD II
	Kepala Desa		

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja KecamatanDolopo Tahun 2021

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.7 Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Dolopo Tahun 2021

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang			
	Kabupaten / Kota			
	Administrasi Umum	Kebutuhan	12 Bulan	Rp. 93.828.374
	Perangkat Daerah	Administrasi		
		Umum		
		Perangkat		
		Daerah yang		

	Terlaksana		
Penyediaan Komponen	Tersedianya	12 Bulan	Rp. 5. 324.565
Instalasi	kebutuhan		
Listrik/Penerangan	komponen		
Bangunan Kantor	Instalasi listrik		
Penyediaan Peralatan	Tersedianya	12 Bulan	Rp. 6.802.800
Rumah Tangga	Peralatan		
	Rumah		
	Tangga		
Penyediaan Bahan	Tersedianya	12 Bulan	Rp. 31.393.709
Logistik Kantor	Bahan Logistik		
	Kantor		
Penyediaan bahan	Tersedianya	12 Bulan	Rp. 5.677.300
Cetakan dan	Barang		
penggandaan	Cetakan dan		
	Penggandaan		
Penyediaan Bahan	Tersedianya	12 Bulan	Rp. 1.740.000
Bacaan dan Peraturan	Bahan Bacaan		
Perundang-undangan	dan Peraturan		
	Perundang-		
	Undangan		
Penyelenggaraan Rapat	Tersedianya	12 Bulan	Rp. 42.890.000
Koordinasi dan	Penyelenggara		
Konsultasi SKPD	an Rapat		
	Koordinasi		
	dan Konsultasi		
	SKPD		
Pengadaan Barang	Kebutuhan	12 Bulan	Rp.23.451.835
 •		•	•

Milik Daeral	Pengadaan		
Penunjang Urusar	Barang Milik		
Pemerintah Daerah	Daerah		
	Penunjang		
	urusan		
	Pemerintah		
	Daerah yang		
	tersedia		
Pengadaan Peralatar	Tersedianya	12 Bulan	Rp.23.451.835
dan Mesin Lainnya	kebutuhan		
	Peralatan dan		
	Mesin Kantor		
Penyediaan Jasa	Tersedianya	12 Bulan	Rp. 81.674.090
Penunjang urusar	Jasa		
Pemeritah Daerah	Penunjang		
	Urusan		
	Pemerintahan		
	Daerah		
Penyediaan Jasa	Tersedianya	12 Bulan	Rp. 16.768.720
Komunikasi, Sumbe	Jasa		
daya air dan listrik	Komunikasi		
	dan Sumber		
	Daya Air		
Penyediaan Jasa Umun	Tersedianya	12 Bulan	Rp. 64.905.370
Pelayanan Kantor	Jasa Pelayanan		
	Umum Kantor		
Pemeliharaan Barang	Tersedianya	12 Bulan	Rp.
Milik Daerah Penunjang	Jasa		124.470.024

Urusan Pemerintahan	Pemeliharaan		
Daerah	dan Pajak		
	Kendaraan		
	Peorangan		
	atau		
	Kendaraam		
	Dinas Jabatan		
Penyediaan Jasa	Tersedianya	12 Bulan	Rp. 68.590.780
Pemeliharaan, Biaya	Jasa		
Pemeliharaan, dan Pajak	Pemeliharaan,		
Kendaraan Perorangan	Biaya		
Dinas atau Kendaraan	Pemeliharaan,		
Dinas Jabatan	dan Pajak		
	Kendaraan		
	Perorangan		
	Dinas atau		
	Kendaraan		
	Dinas Jabatan		
Pemeliharaan Peralatan	Terlaksananya	12 Bulan	Rp. 7.982.250
dan Mesin lainnya	Pemeliharaan		
	Peralatan dan		
	Mesin lainnya		
Pemeliharaan/Rehabilit	Terlaksananya	12 Bulan	Rp. 47.896.994
asi Gedung Kantor dan	Pemeliharaan/		
Bangunan lainnya	Rehabilitasi		
	Gedung		
	Kantor dan		
	Bangunan		

		lainnya		
2.	Program	Terselenggara	12 Bulan	Rp. 28.086.000
	Penyelenggaraan	nya Program		
	Pemerintahan dan	Penyelenggara		
	Pelayanan Publik	an		
		Pemerintahan		
		dan Pelayanan		
		Publik		
	Peningkatan efektifitas	Terlaksananya	12 Bulan	Rp. 28.086.000
	Pelaksanaan Pelayanan	Rapat		
	kepada Masyarakat di	Koordinasi		
	Wilayah Kecamatan	Seksi		
		Pelayanan		
3.	Program Pemberdayaan	Terselenggara	12 Bulan	Rp.
	Masyarakat Desa dan	nya Program		17.303.750
	Kelurahan	Pemberdayaan		
		Masyarakat		
		Desa dan		
		Kelurahan		
	Peningkatan Efektifitas	Terlaksananya	12 Bulan	Rp. 10.583.750
	Kegiatan Pemberdayaan	Musrenbang,		
	Masyarakat di Wilayah	Rapat		
	Kecamatan	Koordinasi,		
		Seksi		
		Pemberdayaan		
		Masyarakat		
		Desa dan		
		Pembangunan		

Peningkatan Kapasit	as Terlaksananya	12 Bulan	Rp. 6.720.000
Lembaga	Program		
Kemasyarakatan	Simulasi Peran		
	Kader PKK		
	dalam		
	Pencegahan		
	Stunting		
4. Program Koordina	si Terselenggara	12 Bulan	Rp. 79.378.400
Ketentraman d	nya Program		
Ketertiban Umum	Koordinasi		
	Ketentraman		
	dan Ketertiban		
	Umum		
Sinergitas deng	n Terlaksananya	12 Bulan	Rp. 75.125.000
Kepolisian Nega	ra Patroli Posko		
Republik Indones	a, Yustisi dakam		
Tentara Nasion	al rangka		
Indonesia, dan Instai	si Penguatan		
Vertikal di Wilay	h Penanganan		
Kecamatan	Covid-19		
Harmonisasi Hubung	nn Terlaksananya	12 Bulan	Rp. 4.253.400
dengan Tokoh Agar	na Rapat		
dan Tokoh Masyaraka	Koordinasi		
	Seksi Kesos		
5. <b>Program</b>	Terselenggara	12 Bulan	Rp. 6.119.200
Penyelenggaraan	nya Program		
Urusan Pemerintah	n Penyelenggara		
Umum	an Urusan		

		Pemerintahan		
		Umum		
	Fasilitasi, Koordinasi,	Terlaksananya	12 Bulan	Rp. 6.119.200
	dan Pembinaan (Bimtek,	Rapat		
	Sosialisasi, Konsultasi)	Koordinasi		
	Wawasan Kebangsaan,	Seksi Trantib		
	dan Ketahanan Nasional	dan		
		Peringatan		
		Hari Besar		
		Nasional		
6.	Program Pembinaan	Terselenggara	12 Bulan	Rp. 37.702.046
	dan Pengawasan	nya Program		
	Pemerintahan Desa	Pembinaan		
		dan		
		Pengawasan		
		Pemerintahan		
		Desa		
	Fasilitasi Pelaksanaan	Terlaksananya	12 Bulan	Rp. 37.702.046
	Pemilihan Kepala Desa	Pemilihan		
		Kepala Desa		

Sumber: Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021 (setelah perubahan)

#### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja

tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	120 ≥ X > 100
2	Baik	X = 100
3	Cukup	80 < X < 100
4	Kurang	$50 \le X \le 80$
5	Sangat Kurang	X < 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian

Kinerja Kecamatan Dolopo Tahun 2021 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dolopo.

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tahun 2021 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Dolopo Tahun 2021

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	78	87,41	112,06%	Sangat Baik	Kasi Pelayanan

	Nilai	Sakip	83	62,19	74,93	Cukup	Kasubag
	Kecamatan						Keuangan
							Program dan
							Pelaporan

Uraian penjelasan tabel : Nilai IKM merupakan hasil Survey mandiri yang dilaksanakan sendiri oleh Kecamatan Dolopo menggunakan Responden sebanyak 100 orang dengan menggunakan 9 unsur sesuai rumus dari Linpeko

Nilai Sakip diperoleh dari Penilaian inspektorat melalui Evaluasi Sakip OPD tiap tahun

Perbandingan capaian kinerja tahun 2021 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2019 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/Sasara	Indikator		2019			2021	
•	n	Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan Kinerja pelayanan publik	IKM Nilai B	77	83,95	109,02 %			
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai Sakip Kecamat an A	81	70,14	86,59 %			
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	1. Indeks Kepuasa n masyarak at Kecamat an 2. Nilai Sakip Kecamat an				77	87,41 62,19	113,5 % 76,78 %

#### Uraian penjelasan tabel:

- 1. Nilai IKM merupakan hasil Survey Mandiri yang dilaksanakan sendiri oleh Kecamatan Dolopo menggunakan Responden sebanyak 100 orang sesuai rumus dari Linpeko.
- 2. Nilai Sakip diperoleh dari Penilaian Inspektorat melalui Evaluasi Sakip OPD tiap tahun.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun periode 2018-2023 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No ·	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	87,41	77	113,5 %
		2.Nilai Sakip Kecamatan	62,19	81	74,30 %

### Uraian penjelasan tabel:

1. Nilai IKM merupakan hasil Survey mandiri yang dilaksanakan sendiri oleh Kecamatan Dolopo menggunakan Responden 100 orang dengan menggunakan rumus dari Linpeko

2. Nilai Sakip diperoleh dari Penilaian Inspektorat melalui Evaluasi Sakip OPD tiap tahun

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/
Kabupaten/Kota lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	1.Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	87,41		
		2.Nilai Sakip Kecamatan	62,19		

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

N	Го	Tujuan/Sasara n	Indikato r Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
		Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	1.Indeks Kepuasa n masyara kat Kecamat an	77	87,41	113,5	Berhasil	-
			2.Nilai Sakip Kecamat an	81	60,19	74,30	Tidak berhasil	Melengka pi kekuranga n Dokumen

### Uraian penjelasan tabel:

- 1. Nilai IKM merupakan hasil Survey Mandiri yang dilaksanakan sendiri oleh Kecamatan Dolopo menggunakan Responden 100 orang yang menggunakan rumus dari Linpeko
- 2. Nilai Sakip diperoleh dari Penilaian Inspektorat melalui Evaluasi Sakip OPD tiap Tahun

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian penyataan kinerja.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaia n	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capai an	Menunjang /Tidak Menunjang
				Program			
				Penunjang			
	Meningkatkan	1. Indeks		Urusan			
	Kinerja	Kepuasan		Pemerintahan			
	Pelayanan	Masyarakat		Daerah			
	Kecamatan	Kecamatan	113,5 %	Kabupaten/Kota			
		2.Nilai		Administrasi			
		Sakip		Keuangan			Tidak
		Kecamatan	74,30 %	Perangkat			Menunjang

		Daerah			
			Tongulumi		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercukupi nya gaji dan tunjangan ASN	96 %	Tidak Menunjang
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaa n Komponen Instalasi Listrik	100 %	Menunjang
		Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	100 %	Menunjang
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan	92 %	Menunjang
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengganda an yang disediakan	100 %	Menunjang
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan yang disediakan	100 %	Menunjang
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanak n	78 %	Menunjang
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Innelsh		
		Pengadaan	Jumlah		

		Peralatan dan Mesin lainnya	pengadaan peralatan	99 %	Menunjang
			dan mesin lainnya yang		
			dilaksanak an		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah			
			Jumlah Jasa		
			komunikas i, Sumber		
		Penyediaan Jasa	daya air dan listrik		
		Komunikasi, Sumber Daya Air	yang dibayarka		
		dan listrik	n	81 %	Menunjang
			Jumlah jasa pelayanan umum		
		Penyediaan Jasa	kantor yang		
		Pelayanan umum Kantor	dilaksanak an	100 %	Menunjang
		Pemeliharaan Barang Milik			, 0
		Daerah			
		Penunjang Urusan			
		Pemerintahan Daerah			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan,			
		Biaya Pemeliharaan,			
		dan Pajak			
		Kendaraan perorangan			
		Dinas atau Kendaraan Dinas			
		Jabatan	T 11	86 %	Menunjang
			Jumlah Pemelihara		
			an Peralatan		
		Pemeliharaan	dan Mesin yang		
		peralatan dan	dilaksanak	100.0/	
		Mesin lainnya Pemeliharaan/re	an Jumlah	100 %	Menunjang
		habilitasi Gedung	Pemelihara	37 %	Menuniang
		Kantor dan	an/rehabil	37 %	Menunjang

					_	
		b	oangunan	itasi		
			ainnya	GedungKa		
				ntor dan		
				bangunan		
				yang		
				dilaksanak		
				an		
		T.	Program	*		
			Penyelenggaraan			
			Pemerintahan			
			Dan Pelayanan			
		I I	Publik			
				Jumlah		
				jenis		
		Т.	Peningkatan	Pelayanan		
				•		
			efektifitas	yang		
			Pelaksanaan	dilaksanak		
		r	oelayanan	an dan		
			kepada	Hasil		
			Masyarakat di	Survey		
			Wilayah	masyaraka	1000	
			Kecamatan	t	100 %	Menunjang
		F	Program			
		F	Pemberdayaan			
			Masyarakat Desa			
			dan Kelurahan			
-			aun retutunun	Jumlah		
				•		
				kegiatan		
				bidang		
				olahraga,k		
				epemudaa		
		T-	Peningkatan	n,kesehata		
			efektifitas	n,keagama		
			Kegiatan	an, Bansos		
		F	Pemberdayaan	dan lintas		
		N	Masyarakat di	sektor		
			wilayah	yang		
			kecamatan	terfasilitasi	100 %	Menunjang
<b>—</b>		I N		Jumlah	100 /0	managang
				Lembaga		
				Kemasyara		
		F	Peningkatan	katan		
			Kapasitas	tingkat		
			Lembaga	desa yang		
			Kemasyarakatan	aktif	100 %	Monuniana
			,	акш	100 /0	Menunjang
			Program			
			Koordinasi			
			Ketentraman dan			
		ŀ	Ketertiban			
		Į	Umum			
			Sinergitas dengan	Jumlah		
			Kepolisian	Koordinasi		
			Negara Republik	Ketentram		
			ndonesia,Tentar	an dan		
		a	a Nasional	ketertiban		
		Į.	ndonesia dan	yang		
			nstansi Vertikal	dilaksanak	99 %	Menunjang
		1 1	TIGHTIGI VELLINAL	anansanan	JJ /U	ivicituilijailig

		di wilayah	an		
		Kecamatan			
			Jumlah		
			Koordinasi		
			dengan		
			Tokoh		
		Harmonisasi	agama dan		
		Hubungan	tokoh		
		Dengan Tokoh	masyaraka		
			-		
		Agama dan	t yang		
		Tokoh	dilaksanak	100.0/	
		Masyarakat	an	100 %	Menunjang
		Program			
		Penyelenggaraan			
		Urusan			
		Pemerintahan			
		Umum			
		Fasilitasi,			
		Koordinasi dan			
		pembinaan	Jumlah		
		(Bimtek,	Koordinasi		
		sosialisasi,konsul	dan		
		tasi) wawasan	pembinaan		
		Kebangsaan dan	yang		
		ketahanan	dilaksanak		
		Nasional	an	96 %	Menunjang
		Program			
		Pembinaan dan			
		Pengawasan			
		Pemerintahan			
		Desa			
			Jumlah		
			Desa yang		
			terfasilitasi		
			pelaksanaa		
		Fasilitasi	n		
		Pelaksanaan	pemilihan		
		Pemilihan Kepala	Kepala		
		Desa	Desa	95 %	Menunjang
		2 000	200	75 /6	mangang
	1		I	l	1

Uraian penjelasan tabel :

## B. Realisasi Anggaran

realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
	Program Penunjang Urusan			
	Pemerintahan Daerah			
1	Kabupaten/Kota			
	Administrasi Keuangan			
	Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan			
	ASN	3.498.507.041	3.359.514.857	96 %
	Administrasi Umum Perangkat			
	Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi			
	Listrik/Penerangan Bangunan			
	Kantor	5.324.565	5.324.300	100 %
	Penyediaan Peralatan Rumah			
	Tangga	6.802.800	6.802.800	100 %
	Penyediaan Bahan Logistik			
	Kantor	31.393.709	28.986.100	92 %
	Penyediaan Barang Cetakan dan	- (== 000	- ( ooo	100.0/
	Penggandaan	5.677.300	5.677.300	100 %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan	1.740.000	1 740 000	100.0/
	peraturan perundang-undangan	1.740.000	1.740.000	100 %
	Penyelenggaraan Rapat	42 000 000	22 (40 000	70.0/
	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.890.000	33.640.000	78 %
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah			
	Daerah			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin			
	lainnya	23.451.835	23.375.000	99 %
	Penyediaan Jasa Penunjang	20.101.000	20.070.000	33 70
	Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Komunikasi,			
	Sumber Daya Air dan Listrik	16.768.720	13.600.399	81 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan			
	Umum Kantor	64.905.370	64.905.360	100 %
	Pemeliharaan Barang Milik			
	Daerah Penunjang Urusan			
	Pemerintah Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,			
	Biaya Pemeliharaan , Biaya			
	Pemeliharaan dan Pajak			
	Kendaraan Perorangan Dinas	68.590.780	58.972.374	86 %

	atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	Pemeliharaan Peralatan dan			
	Mesin lainnya	7.982.250	7.982.250	100 %
	Pemeliharaan / Rehabilitasi			
	Gedung Kantor dan Bangunan			
	lainnya	47.896.994	17.857.700	37 %
	Program Penyelenggaraan			
_	Pemerintahan dan Pelayanan			
2	Publik			
	Peningkatan Efektifitas			
	Pelaksanaan Pelayanan Kepada			
	Masyarakat di Wilayah			
	Kecamatan	28.086.000	28.086.000	100 %
	Program Pemberdayaan			
3	Masyarakat Desa dan Kelurahan			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan			
	Pemberdayaan Masyarakat di			
	Wilayah Kecamatan	10.583.750	10.583.750	100 %
	Peningkatan Kapasitas Lembaga			
	Kemasyarakatan	6.720.000	6.720.000	100 %
	Program Koordinasi			
	Ketentraman dan Ketertiban			
4	Umum			
	Sinergitas dengan Kepolisian			
	Negara republik Indonesia,			
	Tentara Nasional Indonesia dan			
	Instansi Vertikal di Wilayah			
	Kecamatan	75.125.000	74.463.000	99 %
	Harmonisasi Hubungan dengan			
	Tokoh Agama dan Tokoh			
	Masyarakat	4.253.400	4.250.000	100 %
_	Program Penyelenggaraan			
5	Urusan Pemerintahan Umum			
	Fasilitasi, Koordinasi dan			
	Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,			
	Konsultasi) Wawasan			
	Kebangsaan dan Ketahanan			
	Nasional	6.119.200	5.894.200	96 %
	Program Pembinaan dan			
6	Pengawasan Pemerintahan Desa			
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan			
	Kepala Desa	37.702.046	37.415.000	99 %

# C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja				-		
No.		Towart	D 1: .	%Capaia	Anggaran	Realisasi	%Capaia	Tingkat Esisiensi
		Target Realisasi		n	(Rp.)	(Rp.)	n	Loiotenoi
	Meningkatkan							
	Kinerja Pelayanan							
	Kecamatan							
	1.Indeks							
	Kepuasan	77	87,41	113,5 %	168.589.396	129.996.950	77.10 %	
	Masyarakat	//	07,41	113,3 /6	100.369.390	129.990.930	77,10 /6	
	Kecamatan							Efisiensi
	2.Nilai Sakip	81	62,19	74,30 %	323.424.323	268.863.583	82,87 %	
	Kecamatan	01	02,19	74,50 /0	323.424.323	200.003.303	02,07 /0	Efisiensi

Uraian penjelasan tabel:-

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka penca`paian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

2.7	Duo guero /	Indikator Kinerja			Anggaran			TT: 1 (
No	Program/ kegiatan	Target Realisasi		%Capaian	Anggaran	Realisasi	0/ Camaian	Tingkat Esisiensi
•	Regiataii	Target	Realisasi	70Capaiaii	(Rp.)	(Rp.)	%Capaian	Esisielisi
	Program							
	Penunjang Urusan							
	Pemerintahan							
1	Daerah							
1	Kabupaten/Kota							
	Administrasi							
	Keuangan							
	Perangkat Daerah							
	Penyediaan Gaji							
	dan Tunjangan				3.498.507.	3.359.514.		
	ASN				041	857	96 %	
	Administrasi							
	Umum Perangkat							
	Daerah							
	Penyediaan							
	Komponen							
	Instalasi							
	Listrik/Peneranga							
	n Bangunan				5.324.565	5.324.300	100 %	

Kantor					
Penyediaan					
Peralatan Rumah		6.802.	6.802.8		
Tangga		800	00	100 %	
Domyodiaan Pahan			20 006 10		
Penyediaan Bahan		21 202 700	28.986.10	02.0/	
Logistik Kantor		31.393.709	0	92 %	
Penyediaan					
Barang Cetakan		F (77 200	E (FF 200	100.0/	
dan Penggandaan		5.677.300	5.677.300	100 %	
Penyediaan Bahan					
Bacaan dan					
peraturan					
perundang-		1 740 000	1 740 000	100 %	
undangan		1.740.000	1.740.000	100 %	
Penyelenggaraan					
Rapat Koordinasi			22 (40 00		
dan Konsultasi		42 000 000	33.640.00	70.0/	
SKPD		42.890.000	0	78 %	
Pengadaan Barang					
Milik Daerah					
Penunjang Urusan					
Pemerintah					
Daerah					
Pengadaan Peralatan dan			22 275 00		
		23.451.835	23.375.00	99 %	
Mesin lainnya		23.431.833	0	99 %	
Penyediaan Jasa Penunjang					
Urusan					
Pemerintahan					
Daerah					
Penyediaan Jasa					
Komunikasi,					
Sumber Daya Air			13.600.39		
dan Listrik		16.768.720	9	81 %	
Penyediaan Jasa		10.7 00.7 20		01 /0	
Pelayanan Umum			64.905.36		
Kantor		64.905.370	0	100 %	
Pemeliharaan		3 2.3 20.0. 3			
Barang Milik					
Daerah					
Penunjang					
Urusan					
Pemerintah					
Daerah					
Penyediaan Jasa		 ·			
Pemeliharaan,					
Biaya					
Pemeliharaan ,					
Biaya					
Pemeliharaan dan					
Pajak Kendaraan					
Perorangan Dinas					
atau Kendaraan			58.972.37		
Dinas Jabatan		68.590.780	4	86 %	

1 1	Pemeliharaan	İ					
	Peralatan dan						
	Mesin lainnya			7.982.250	7.982.250	100 %	
	Pemeliharaan			7.702.250	7.702.230	100 /0	
	/Rehabilitasi						
	Gedung Kantor						
	dan Bangunan				17.857.70		
	lainnya			47.896.994	0	37 %	
				47.090.994	U	37 /0	
	Program Penyelenggaraan						
	Pemerintahan dan						
2	Pelayanan Publik						
	Peningkatan						
	Efektifitas						
	Pelaksanaan						
	Pelayanan Kepada Masyarakat di						
	Wilayah				28.086.00		
	Kecamatan			28.086.000	0	100 %	
				20.000.000	U	100 /0	
	Program Pemberdayaan						
3	Masyarakat Desa dan Kelurahan						
	Peningkatan Efektifitas						
	Kegiatan						
	Pemberdayaan						
	Masyarakat di				10 E92 7E		
	Wilayah			10 E92 7E0	10.583.75	100 %	
	Kecamatan			10.583.750	0	100 /0	
	Peningkatan						
	Kapasitas						
	Lembaga			6 720 000	6 720 000	100.9/	
	Kemasyarakatan			6.720.000	6.720.000	100 %	
	Program Koordinasi						
4	Ketentraman dan						
_ I	Ketertiban Umum						
	Sinergitas dengan						
	Kepolisian Negara						
	republik						
	Indonesia, Tentara Nasional						
	Indonesia dan						
	Instansi Vertikal di				74.460.00		
	Wilayah			7E 10E 000	74.463.00	00.9/	
$\vdash$	Kecamatan			75.125.000	0	99 %	
	Harmonisasi						
	Hubungan dengan						
	Tokoh Agama dan			4.050.400	4.050.000	100.0/	
	Tokoh Masyarakat			4.253.400	4.250.000	100 %	
	Program						
	Penyelenggaraan						
	Urusan						
5	Pemerintahan						
5	Umum					0.6.61	
	Fasilitasi,					96 %	

	Koordinasi dan		6.119.200	5.894.200		
	Pembinaan					
	(Bimtek, Sosialisasi,					
	Konsultasi)					
	Wawasan					
	Kebangsaan dan					
	Ketahanan					
	Nasional					
	Program					
	Pembinaan dan					
	Pengawasan					
	Pemerintahan					
6	Desa					
	Fasilitasi					
	Pelaksanaan					
	Pemilihan Kepala		37.702.0	37.415.0		
	Desa		46	00	99 %	

Uraian per	njelasan tab	el:		

#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah DaerahKabupaten Madiun Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2021 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2021 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun menetapkan sebanyak 01 tujuan, 02 sasaran dengan 02 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan dari Kecamatan Dolopo adalah Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan akuntabel Dalam Pelayanan Kecamatan yang berkualitas dengan 2 Indikator :
  - Indeks Kepuasan masyarakat Kecamatan tercapai 113,5% (kategori Sangat Baik)
  - Nilai Sakip Kecamatan tercapai 74,30 % (Kategori Cukup)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah DaerahKabupaten Madiun dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 3.990.520.760 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 3.795.790.390, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2021 serapan anggaran sebesar 95% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 4,88%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Madiun.

Dolopo, Februari 2022

CAMAT DOLOPO

HERY FAJAR NUGROHO/S.Sos,M.Si

Pembina

NIP 197205241997031004